

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al Rasyid, Harun. *Hukum Pemilu: Politik Hukum Pengawasan Pemilu dan Penegakan Hukum Pemilu*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Alhamid, M. *Penanganan Pelanggaran Pemilu*. Jakarta: Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2011.
- Arinanto, Satya. *Hukum dan Dinamika Pemilu di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Asshiddiqie, Jimly. *Demokrasi dan Pengawasan Konstitusional di Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2020.
- Asshiddiqie, Jimly. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Haris, Syamsuddin. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Desain dan Pelaksanaan*. Jakarta: LIPI Press, 156.
- Harun, Refly. *Demokrasi, Pemilu, dan Negara Hukum*. Jakarta: Konstitusi Press, 2012.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Pemilu dan Partai Politik di Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press, 2020.
- Isra, Saldi. *Sistem Pemerintahan dan Pemilu di Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press, 2020.
- Junaidi. *Sengketa Administrasi Pemilu*. Jakarta: Kode Inisiatif, 2011.
- Marbun, S.F. *Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2016.
- Mochtar, Arifin Zainal. *Demokrasi dan Pengawasan Pemilu*. Jakarta: Konstitusi Press, 2019.
- Noor Azis, M. *Pengkajian Hukum tentang Pemilihan Kepala Daerah*. Jakarta: Badan Hukum Pembinaan Hukum Nasional, 2011.
- Nugroho. *Manajemen Pemilu di Indonesia: Tantangan Institusi Penyelenggara dalam Era Demokratisasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2020.
- Prasetyo, Teguh. *Pemilu Bermartabat*. Depok: Rajawali Press, 2017.
- Saleh. *Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggara Pemilu*. Jakarta: Sinar Grafika,

2017.

- Sanit, Arbi. *Sistem Politik Indonesia: Pemilu, Partai, dan Demokrasi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
- Santoso, Topo. *Pemilu dan Demokrasi di Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 2020.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1983.
- Sulastrri, Sri. *Desentralisasi dan Tata Kelola Pemerintahan*. Yogyakarta: UGM Press, 2019.
- Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo, 1999.
- Susanti, Bivitri. *Tata Kelola Pemilu di Indonesia: Antara Regulasi dan Implementasi*. Jakarta: LP3ES, 2019.
- Suswantoro, Gunawan. *Pengawasan Pemilu Partisipatif: Gerakan Sipil Untuk Demokrasi Indonesia*. Jakarta: Erlangga, 2015.
- Syafrinaldi. *Hukum Pemilu dan Demokrasi di Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press, 2020.
- The Liang Gie. *Administrasi Perkantoran Modern*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2009.
- Tutik, Triwulan Titik. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam lingkungan aparatur pemerintah*. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Yamin, M. *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia: Studi Tentang Dinamika Pemilu dan Representasi Politik*. Medan: USU Press, 2019.

Jurnal

- Achmad, Arifulloh. "Pelaksanaan Pilkada Serentak yang Demokratis, Damai, dan Bermartabat." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 2, 2015. <http://dx.doi.org/10.26532/jph.v3i3.1376>
- Bungasan, Hutapea, "Dinamika Hukum pemilihan Kepala Daerah di Indonesia." *Jurnal Rechts Vinding* 4, 2015. <https://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v4i1.136>
- Husaini, Raihan, "Peran Badan Pengawasan Pemilu Dalam Penanggulangan Pelanggaran Pemilihan Umum di Era Digital Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum." *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik* 1, 2024. <https://doi.org/10.62383/demokrasi.v1i3.264>

Rudy. "53 Mencari Bentuk Kedaulatan dalam UUD Tahun 1945." *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* 7, 2015. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v7no3.383>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang Terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

LAMPIRAN

Surat Permohonan Riset/Penelitian Bawaslu Provinsi Daerah Khusus Jakarta



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS HUKUM

Jalan dr. Antonius Suroyo
Tembalang, Semarang, Kode Pos 50275
Telepon (024) 76918201
Laman: www.fh.undip.ac.id, Pos-el: [fh\[at\]live.undip.ac.id](mailto:fh[at]live.undip.ac.id)

Nomor : 496 /UN7.F1/AK/IV/2025
Lamp. :
Hal : Permohonan Riset/Penelitian

Yth. Ketua Bawaslu DKI Jakarta
Jl. Letjen M.T. Haryono No.Kav. 52
DKI Jakarta

Kami sampaikan dengan hormat, bahwa dalam rangka penyusunan penulisan hukum (skripsi) sesuai dengan kurikulum Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, untuk mendapatkan bahan penyusunan skripsi perlu melakukan penelitian.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mohon Saudara berkenan memberikan ijin pelaksanaan penelitian di lingkungan instansi Saudara kepada mahasiswa berikut:

nama : Rafi Angga Saputra
NIM : 11000121140612
alamat : Jl .Ratna, Komp. Pondok Jati Indah Blok A6 No.3, Bekasi Selatan
nomor HP : 082173023002
bidang minat : Hukum Tata Negara
judul skripsi : Wewenang Badan Pengawas Pemilu Dalam Menangani Pelanggaran Administrasi Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 Di Provinsi Daerah Khusus Jakarta

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.



Dekan,
Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum./n
NIP.196711191993032002

Surat Pemberian Ijin Penelitian Bawaslu Provinsi Daerah Khusus Jakarta



Jl. Letjen M.T Haryono No. Kav 52-53, Pancoran, Jakarta Selatan, 12770
Telepon/Fax : 021-25032633
Email: set.dki@bawaslu.go.id

FORMULIR PEMBERITAHUAN TERTULIS

Berdasarkan permohonan Informasi pada tanggal 08 Mei 2025 dengan nomor pendaftaran 05/BawasluProvDKIJakarta/PPID/V/2025.

Kami menyampaikan kepada Saudara:

Nama : Rafi Angga Saputra
Alamat : Jalan ratna, komp. pondok jati indah blok a6 no 3, bekasi selatan
No. Telp/Email : 082173023002 / saputrarafi2@gmail.com

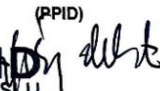
Pemberitahuan sebagai berikut:

Jenis Informasi Dapat Diberikan , termasuk dalam informasi publik berdasarkan materi muatan Pemilu dan/atau Pemilihan

No.	Hal -hal terkait Informasi Publik	Keterangan	
1.	Penguasaan Informasi Publik	☒ Kami	☐ Badan Publik lain...
2.	Bentuk fisik yang tersedia	☒ Softcopy .	☐ Hardcopy..
3.	Biaya yang dibutuhkan	☐ Penyalinan	Rp 0,
		☐ Pengiriman	Rp 0,
		☐ Lain-lain	Rp 0,
		Jumlah	Rp 0,-
4.	Waktu penyedia	1 hari	
5.	Penjelasan Informasi yang dimohon: Terima kasih telah menghubungi layanan PPID Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. Dokumen Permohonan telah dikirimkan melalui sistem E-PPID melalui WA/Email pemohon.		

Jakarta, 09 Mei 2025

Penjabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

(PPID)

PPID
BAWASLU
PROVINSI DKI JAKARTA
(AFIFUDDIN)

Tembusan:

1. Pembina PPID Bawaslu Provinsi DKI Jakarta
2. Tim Pertimbangan PPID Bawaslu Provinsi DKI Jakarta
3. Atasan PPID Bawaslu Provinsi DKI Jakarta
4. Arsip

DOKUMENTASI

